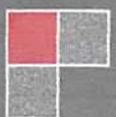


2020



Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) 2020

Sekretariat DPRD



KATA PENGANTAR

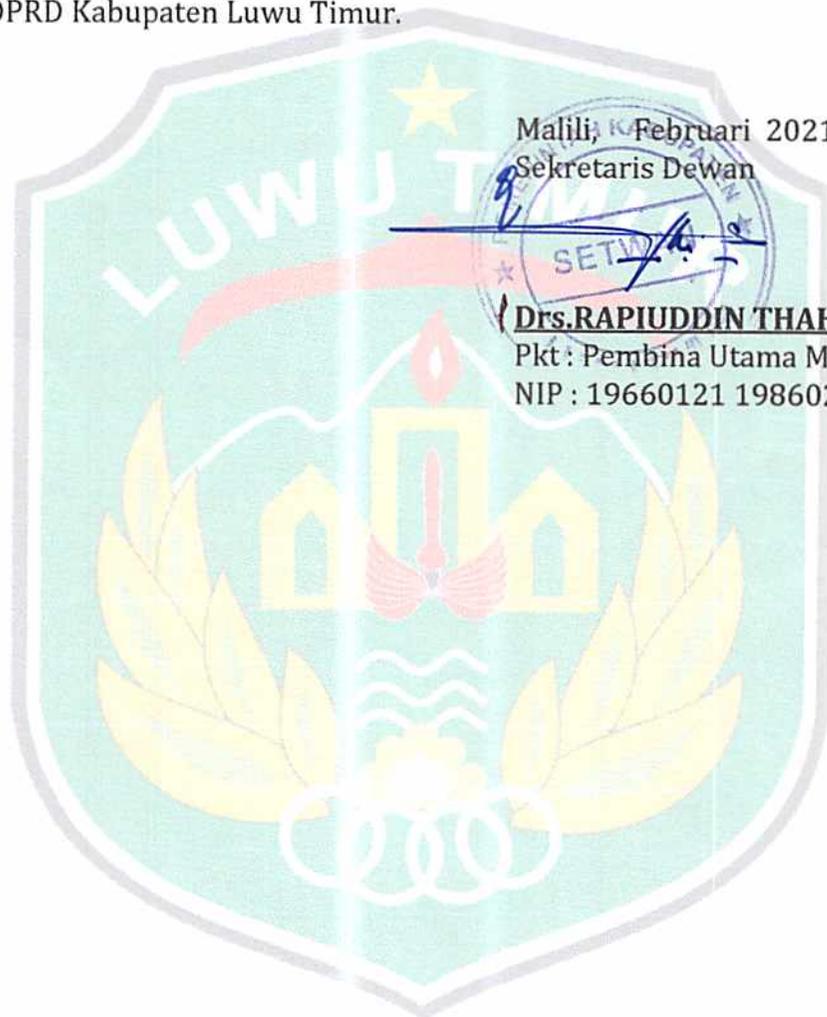
Dengan Mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahirobbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumberdaya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternative penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2020 ini kemudian dituangkan kedalam

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.



Malili, Februari 2021

Sekretaris Dewan

Drs. RAPIUDDIN THAHIR, M.Si

Pkt : Pembina Utama Madya

NIP : 19660121 198602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2020.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, walaupun beberapa IKU tidak mencapai target yang sudah ditentukan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih rendahnya pemahaman aparatur dibidang indikator yang terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IHKTIAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum dan Organisasi	3
Struktur Organisasi	3
Komposisi SDM	5
Peran Organisasi	8
Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
Rencana Strategis	10
Program Untuk Pencapaian Sasaran	10
Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
BAB IV PENUTUP	98
LAMPIRAN	100

DASAR HUKUM

1. Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 : kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 5, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf (a) terdiri atas:
 - a. Capaian kinerja makro;
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah ; dan
 - c. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki posisi yang cukup strategis dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut hakekatnya merupakan visi dan misi masyarakat yang telah mempercayakan suaranya kepada para wakilnya di lembaga DPRD, dengan kata lain, Sekretariat DPRD harus tumbuh menjadi unit organisasi yang dapat memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, tentu diperlukan unsur aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang handal.

Penilaian terhadap tanggungjawab atau akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra birokrasi termasuk jajaran sekretariat DPRD. Kemudian secara umum instansi atau unit kerja dinilai berhasil, apabila mampu melaksanakan tanggungjawabnya yang setidaknya-tidaknnya berkaitan dengan 5 (lima) kategori penilaian :

1. Mampu melaksanakan misi, tugas pokok , fungsi dan kewenangan dengan sebaik-sebaiknya;
2. Mampu selalu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan public;
3. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, SDM, peralatan dan kelengkapan kerja serta berbagai sumberdaya lainnya;
4. Berhasil membangun budaya kerja yang baik;
5. Mampu mengembangkan budaya kompetitif melalui kompetensi yang dimiliki pada era yang penuh persaingan, seperti kreativitas, produktifitas tinggi, profesionalisme yang matang disertai peningkatan daya saing individu dan organisasi;

6. ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja

Maksud dan Tujuan

Penilaian terhadap tanggungjawab atau akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra birokrasi termasuk jajaran sekretariat DPRD. Kemudian secara umum instansi atau unit kerja dinilai berhasil, apabila mampu melaksanakan tanggungjawabnya yang setidaknya-tidaknya berkaitan dengan 5 (lima) kategori penilaian :

1. Mampu melaksanakan misi, tugas pokok , fungsi dan kewenangan dengan sebaik-sebaiknya;
2. Mampu selalu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan public;
3. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, SDM, peralatan dan kelengkapan kerja serta berbagai sumberdaya lainnya;
4. Berhasil membangun budaya kerja yang baik;
5. Mampu mengembangkan budaya kompetitif melalui kompetensi yang dimiliki pada era yang penuh persaingan, seperti kreativitas, produktifitas tinggi, profesionalisme yang matang disertai peningkatan daya saing individu dan organisasi;

Dengan Paradigma tersebut, melalui penyusunan Lakip ini, diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas individu dan organisasi untuk mendukung peningkatan kualitas lembaga, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output kerja yang baik, dengan demikian diharapkan akan menghasilkan benefit dan pengaruh kinerja pelayanan yang sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.

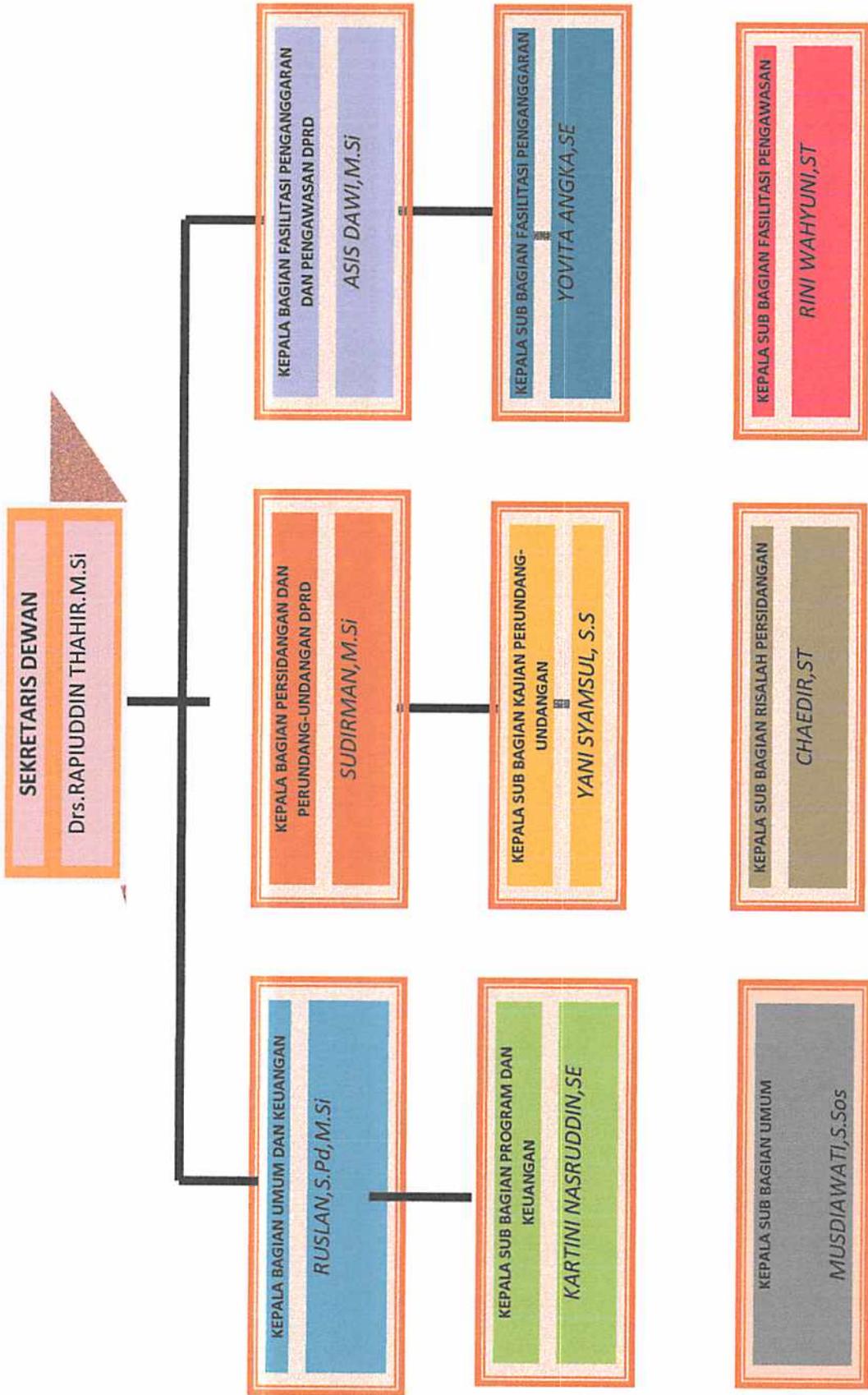
Gambaran Umum dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Staf Ahli maka Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan.

1. Struktur Organisasi

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dewan membawahi 3 bagian dan & 6 Sub Bagian.

Adapun Tabel Struktur organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:



2. Komposisi SDM

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terdapat berbagai kondisi yang sama seperti Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD.) lain pada umumnya. Salah satu kondisi yang terjadi di dalam lingkup internal bisa dibagi kedalam berbagai kondisi , diantaranya :

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember 2020 berjumlah 80 Orang terdiri :

P N S : 25 Orang

Upah Jasa : 55 Orang

Dari Jumlah pegawai 80 orang yang ada selama tahun 2019 untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sudah cukup memadai.

b. Distribusi Pegawai

Pendistribusian pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan memenuhi kebutuhan di tiga bagian, tiap bagian tidak sama jumlahnya, disesuaikan dengan beban kerja tiap-tiap bagian. Dalam pendistribusian Pegawai di Tahun 2020 dirasakan belum optimal, Hal ini dikarenakan masih terjadinya ketidakmerataan pembagian komposisi pegawai di beberapa sub bagian , sementara bagian lain masih dipandang belum mencukupi dari sisi jumlah pegawai, disamping itu perlu adanya penyempurnaan pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan minimal dalam melayani anggota DPRD Luwu Timur.

c. Komposisi Pegawai

Berdasarkan komposisi jabatan, seluruh jabatan yang ada sudah diisi sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatan serta persyaratan administrasi yang seharusnya. Berdasarkan komposisi pegawai, terdapat mayoritas Golongan III yang sudah menduduki jabatan struktural yang berjumlah 6 orang. Beberapa pegawai sudah terakomodir dalam tugas tambahan dalam kegiatan dan melayani tugas DPRD,

misalnya pendamping Komisi sebanyak 6 Orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebanyak 8 Orang, Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 Orang, Pengurus barang Sebanyak 1 Orang, dan Penyimpan. Barang 1 Orang. Pemetaan komposisi dimaksud sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kompetensi pegawai dalam menunjang kegiatan di Tahun 2020 dan peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

d. Jenjang Pendidikan Pegawai

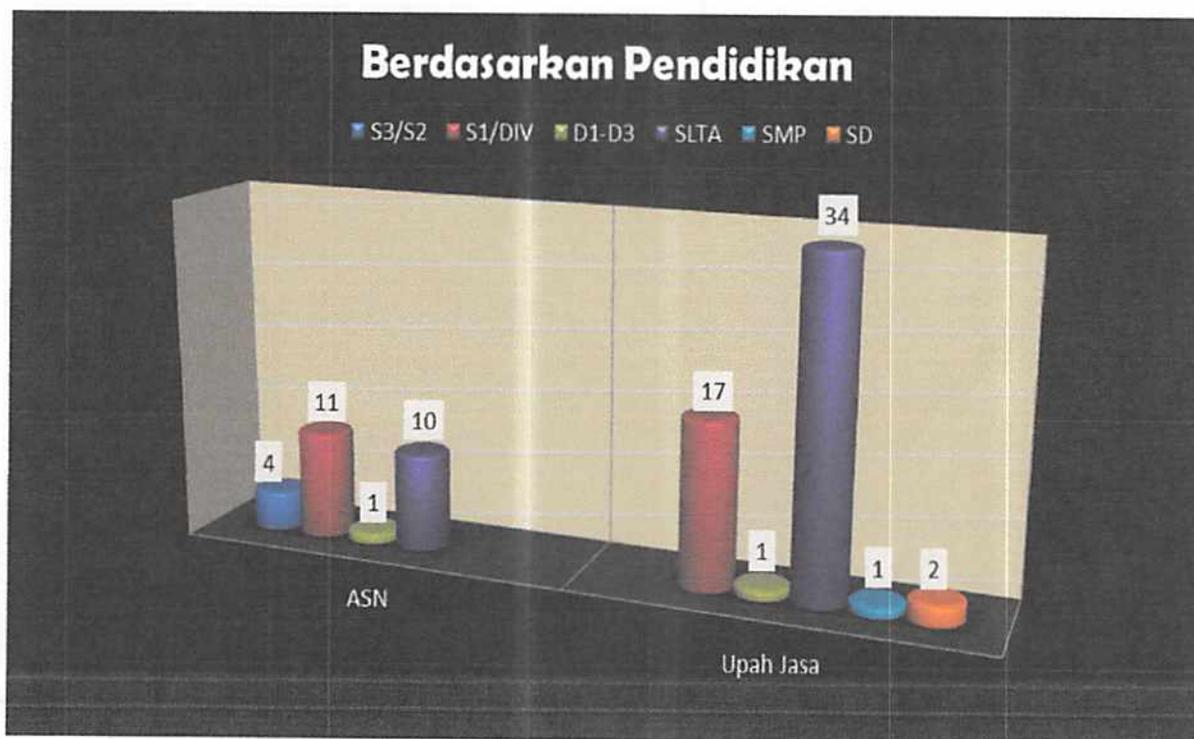
- Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ditunjang dengan tenaga pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. Berikut tabel komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur :

• Tabel 1.1

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	II.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	II.c	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1
4	II.d	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1
5	III.a	-	-	-	2	-1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
6	III.b	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

7	III.c	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
8	III.d	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
9	IV.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	IV.b	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
11	IV.c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39
	Jumlah													30	49



Grafik.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari data diatas, apabila jenjang pendidikan aparatur berbanding lurus dengan kepangkatan dan jabatan dalam OPD, maka komposisi tersebut telah terbagi secara merata namun masih kurang dalam kuantitas aparatur. Jenjang pendidikan ini mempengaruhi kinerja tiap orang dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dari sisi keilmuan. Pengalaman kerja masing-masing aparatur menjadi faktor penting untuk

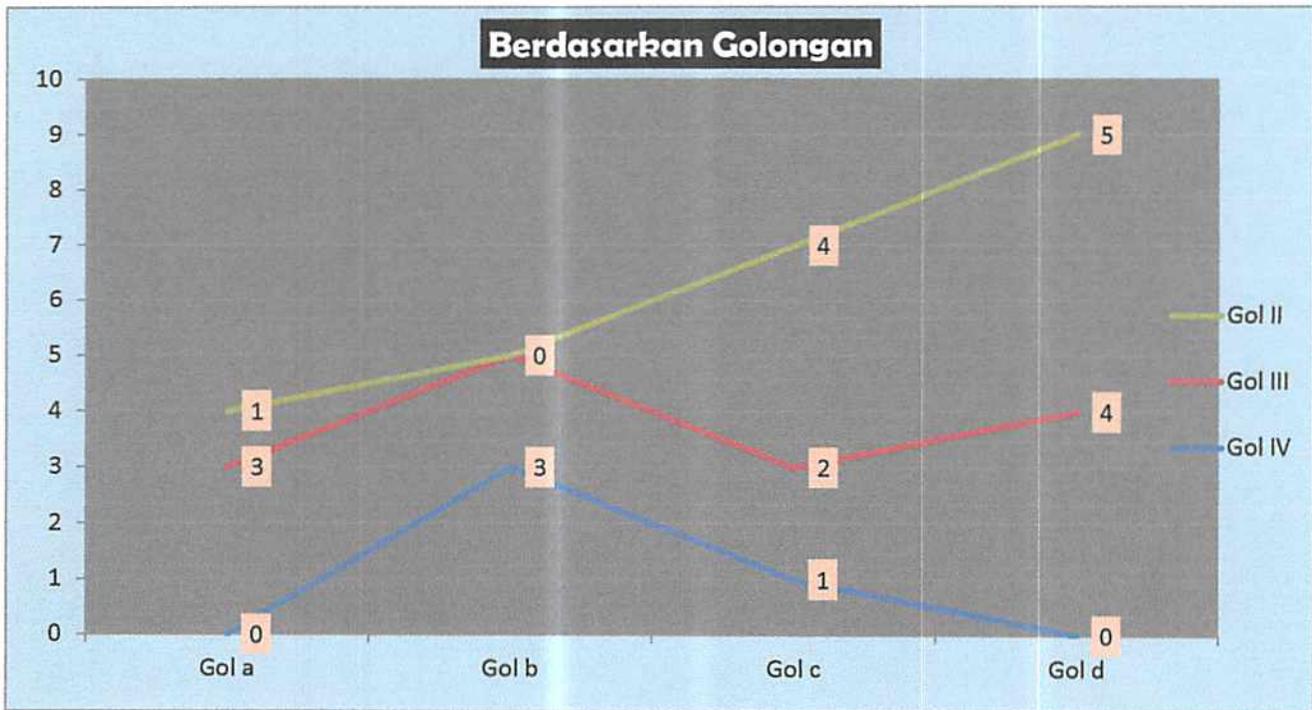
memenuhi keterbatasan kuantitas aparatur yang ada. Namun demikian , ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang berupaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan Pasca Sarjana. Hal ini patut didorong oleh kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pegawai Yang akan melanjutkan pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan pada akhirnya dapat menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya.

e. Kepangkatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terbagi kedalam berbagai golongan kepangkatan kepegawaian. Pembagian golongan pegawai dapat dilihat pada

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	III	-	1	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
3	II	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	8	2
4	CPNS															
	• Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39	



Grafik.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

F. Berdasarkan Jabatan

- Esselon II : 1 Orang
- Esselon III : 3 Orang
- Esselon IV : 6 Orang
- Non Esselon : 15 Orang

3. PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Staf Ahli maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban membantu DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi

:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Isu Strategis Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD
2. Inkonsistensi antara rencana kerja dan pelaksanaan kerja DPRD yang sudah disepakati bersama, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai rencana yang menyebabkan tertundanya dan atau tidak terlaksananya kegiatan, yang berimplikasi pada efektifitas dan atau optimalisasi penyerapan anggaran dan kinerja
3. Kebijakan politik yang berkembang di lembaga DPRD secara dinamis ikut mewarnai pengambilan keputusan yang menuntut rencana kerja yang disusun berpotensi mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu
4. Sumber daya ASN yang terbatas dalam kuantitas dibandingkan jumlah kegiatan yang maksimal menuntut ASN mengerjakan pekerjaan lebih secara bersama meskipun dengan lintas bidang yang berbeda dan bukan menjadi tanggung jawab fungsional dan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan yang mengacu pada target indikator-indikator yang ditetapkan serta mendukung program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sehingga kinerja lingkungan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Sekretariat DPRD Kab.Luwu timur menetapkan rencana strategi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam rencana menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta tujuan strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur.

Program Untuk Mencapai Sasaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kepala Daerah adalah :

VISI

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2016 – 2021 adalah :

MISI

“ Meningkatkan kualitas dan efektifitas fasilitas tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Luwu Timur ”

Sebagai Penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan Kualitas dan efektifitas Fasilitas tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Luwu Timur

Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lembaga DPRD yang Berkualitas

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD

Strategi : 1. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan keperluan tugas Pimpinan dan anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Menyusun agenda rapat-rapat, mempersiapkan, menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan tepat waktu

3. Menghitung kebutuhan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah dan memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada.
4. Memperbanyak pamflet tentang mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Dewan melalui sekretariat DPRD
6. Pelaporan keuangan dan kinerja disusun oleh tim unsur bidang apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten.

Kebijakan :

1. Melakukan kerjasama antar pihak eksekutif dengan legislative dalam penyelesaian administrasi;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antara pihak Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia,

Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur adalah memfasilitasi antar legislatif dan eksekutif baik dari anggarannya maupun kelancaran administrasi yang harus benar-benar profesional dan akuntabel sehingga dapat berjalan maksimal.

- a. Program utama :
 - a. Program persidangan dan perundang-undangan
 - b. Program peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD
- b. Program Penunjang :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program perencanaan dan penganggaran SKPD
- g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang berada dalam perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur dalam peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD. Penetapan Indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta kegiatan –kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Berdasarkan indikator kinerja dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2020, Rencana Kerja Sekretariat DPRD mencakup sasaran berikut indikator kerjanya dan program serta kegiatannya yang dilaksanakan tahun 2020. Sasaran dan rencana kinerja dilengkapi dengan indikator kerjanya , sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan , sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program

yang dilaksanakan . Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok kinerja kegiatan , yang meliputi Masukan (Inputs), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcomes) berikut Tabel Indikator Kinerja Utama meliputi :

Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	Cakupan kinerja lembaga DPRD	Nilai	(Nilai Cakupan kinerja fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD *65%+Nilai Cakupan kinerja fungsi perindang-undangan DPRD *35%)	laporan Kegiatan dan laporan Notulen	SETWAN
		Cakupan kinerja fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD	%	(Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu/Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati *40%+Jumlah RDP dan Kunjungan Lapangan yang dilakukan/Jumlah RDP dan Kunjungan Lapangan yang direncanakan *30%+Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim ke Bupati/Jumlah Rekomendasi DPRD ke Bupati yang direncanakan*20%)*100%	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
		Cakupan kinerja fungsi perindang-undangan DPRD		Jumlah Ranperda Yang ditetapkan/Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Jumlah Perda Inisiatif yang disusun*100	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik,realisasi, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Adapun tujuannya adalah :

➤ Tujuan

**Mewujudkan kualitas lembaga DPRD
yang Berkualitas**

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur ,spesifik,rasional dapat dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yaitu :

Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD

Dalam bab ini juga disajikan capaian indikator Kinerja Utama (IKU), dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan kualitas lembaga DPRD yang Berkualitas		Cakupan kinerja lembaga DPRD	%	58,13	68,75	70,53	74,38	79,39	79,39
		Meningkatnya kapasitas Lembaga DPRD	Cakupan kinerja fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD	%	62,50	76,39	76,69	76,75	77,27	77,27
			Cakupan kinerja fungsi perundang-undangan DPRD	%	50,00	54,55	59,09	70,00	83,33	83,33

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tahun anggaran 2020 mengalami 4 (Empat) kali perubahan terhadap program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang terkait dengan pengelolaan belanja, perubahan tersebut dapat di lihat pada table di bawah ini :

Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 maka dilakukan refocussing anggaran. Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, pergeseran sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. APBD Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1	2	3	4	5	6	7
1	RKPD/Renja-PD Pokok	9	50	14.829.238.675	18.196.374.850	33.025.613.525
2	APBD/DPA Pokok	9	51	14.784.036.175	19.034.823.808	33.818.859.983
3	PERGESERAN I	9	49	14.784.036.175	17.159.306.258	31.943.342.433
4	PERGESERAN II	9	43	14.651.434.175	9.919.185.098	24.570.619.273
5	RKPD PERUBAHAN/Renja -PD Perubahan	9	45	14.651.434.175	15.063.196.389	29.714.624.573
6	APBD PERUBAHAN/DPP A	9	43	14.651.434.175	16.228.555.798	30.879.989.973

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat penjelasan atas perubahan/pengurangan jumlah program dan kegiatan serta pagu anggaran dari Tahapan RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sampai dengan Tahapan DPA Perubahan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

➤ Perubahan pagu anggaran dari RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah kegiatan mengalami refocussing yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini direfocussing dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan.

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kegiatan ini direfocussing dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan.

3. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini difokuskan dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan.
4. Kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran dan Prognosis
Kegiatan ini tidak ditunda dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan.
5. Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh agama
Kegiatan ini difokuskan dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19.
6. Kegiatan pelaksanaan Pembahasan Kode Etik DPRD
Kegiatan ini tidak ditunda dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan.
7. Kegiatan Penyusunan Perda Inisiatif
Kegiatan ini dikarenakan difokuskan anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan.
8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini dikarenakan difokuskan anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan.

➤ **Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)**

Perubahan besaran pagu indikatif untuk Belanja Tidak Langsung dari RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD. Perubahan sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena pada rancangan awal RKPD Pokok, disediakan gaji dan tunjangan untuk 25 org ASN dan 30 orang Anggota Dewan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (Gaji 14) dan Gaji 13. Disamping itu dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya bagi ASN dan Anggota Dewan, maka pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung disesuaikan pada saat penyusunan Perubahan RKPD/Renja-PD.

➤ Pada tahapan RKPD/Renja-PD Pokok ke tahapan APBD/DPA Pokok terdapat beberapa Program kegiatan yaitu mengalami pengurangan anggaran yaitu :

🚧 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu :**

1. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah;

Kegiatan ini difokuskan dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19.

🚧 **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Kegiatan ini dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan.

🚧 **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Kegiatan ini difokuskan dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19.

2. Penyediaan Jasa Konsultasi/Tenaga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan di refokuskan pada rekening belanja Tim pakar dan anggarannya di alihkan untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

✚ **Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;

2 Kegiatan ini difokuskan karena untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan.

✚ **Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD**

1. Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Kegiatan ini difokuskan dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau melibatkan banyak orang karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19.

✚ Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa pada tahapan Pergeseran II ke tahap RKPD/Renja-PD Perubahan, terdapat Pengurangan anggaran yang sangat signifikan pada Program dan kegiatan, meliputi :

✚ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
4. Penyediaan ATK;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen instalasi Listrik;
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD
11. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah;

✚ **Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Meliputi kegiatan sebagai berikut :**

1. Pembangunan rumah Jabatan
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan;
5. Pemeliharaan Rutin/berkalan Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinans/Operasional

✚ **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

✚ **Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

✚ **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang0Undangan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

🚩 Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Rapat-Rapat Paripurna;
3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
4. Komunikasi, Publikasi dan Kprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah;
6. Penyusunan Renja DPRD;

🚩 Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD

1. Pembahasan Kode Etik DPRD;
2. Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Pembahasan KLPJ;
4. Pembahasan LHP-BPK;
5. Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS-P
6. Pembahasan APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD.

Dari Semua Kegiatan ini mengalami pengurangan dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka besaran pagu anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Kab. Luwu Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 .

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 30,879,989,973,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	14,651,434,175,-	37
2	Belanja Langsung	16,228,555,798,-	63
Jumlah		30,879,989,973,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kapasiltas Lembaga DPRD	Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD	6,750,489,798,-	90%
	Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	2,374,537,800,-	90%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,329,248,798,-	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,061,547,450,-	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatus	246,000,000,-	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	268,303,200,-	100%
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	9,230,000,-	100%
	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	6,725,000,-	100
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah	1,182,473,600,-	100
TOTAL		16,288,555,798,-	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 16,288,555,798,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kapasitas lembaga DPRD dengan besaran 65%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD yaitu sebesar 45% dari total anggaran belanja langsung.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Perjanjian Kinerja Pegawai ASN dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu , penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati dan dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta daya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020.

1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2020 berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Organisasi.

Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

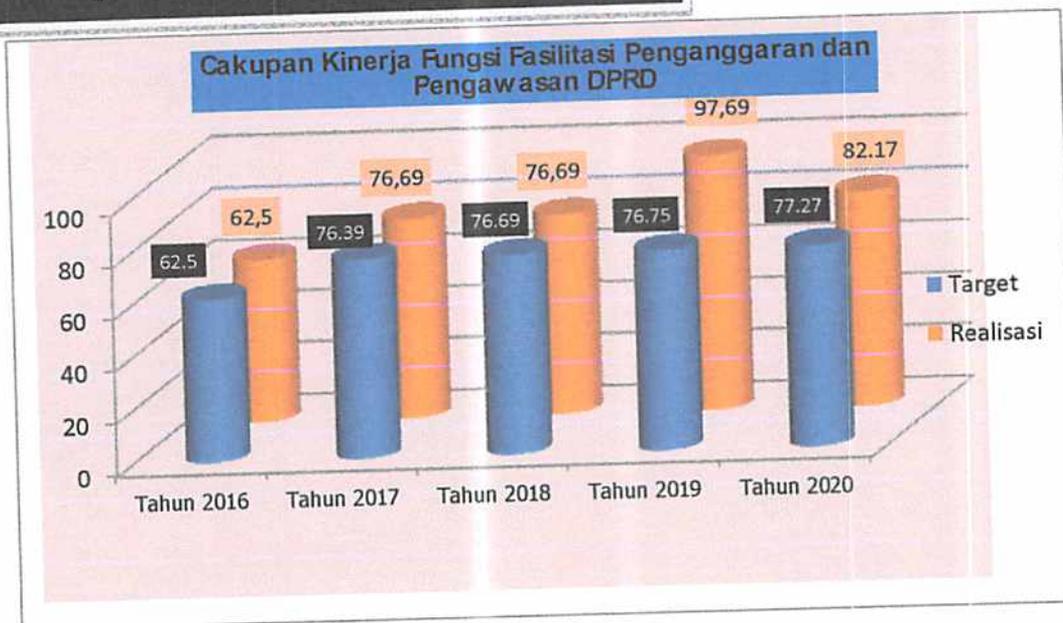
Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Cakupan Kinerja Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	77,27	82,17	106,34
		Cakupan Kinerja Fungsi Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD	83,33	7	8,40

Data Semester II

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Kapasitas lembaga DPRD



Garafik .3



Grafik.4

Dari 2 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa pencapaian 1 (satu) indikator yaitu Cakupan kinerja fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terealisasi sebesar **82,17** Persen, Cakupan kinerja fungsi perundang-undangan terealisasi sebesar **7** persen.

Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2 Analisis sCapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama **"Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD"** tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Sasaran ke -1 Indikator -1

Sasaran I	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD		
	Tahun 2020		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kinerja Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	77.27%	82.17%	106.34%

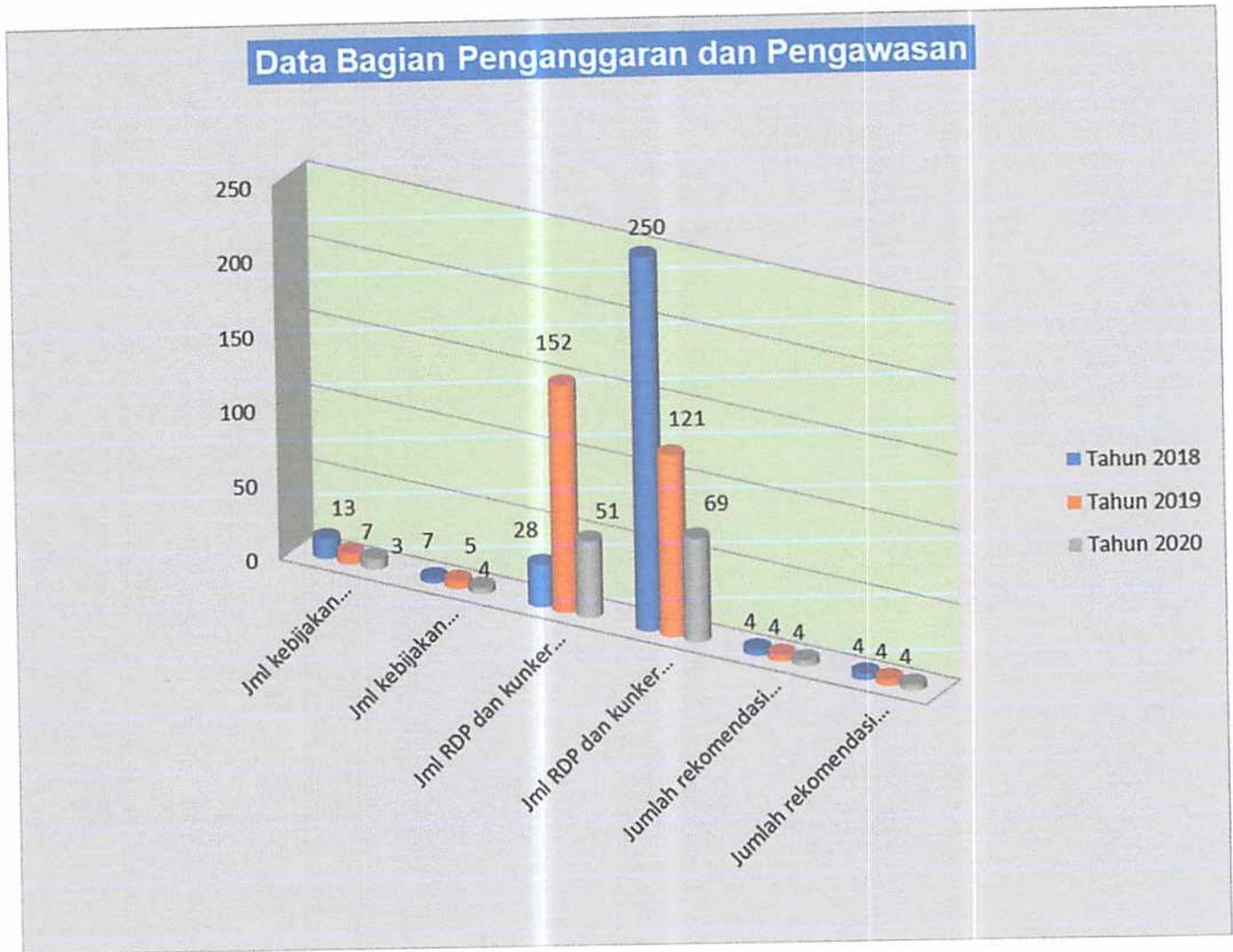
1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020

➤ Cakupan Kinerja Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

- Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang Pertama yaitu Persentase Cakupan Fungsi Kinerja Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu dibagi dengan jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati di kali 40% ditambah Jumlah RDP dan kunjungan lapangan yang dilakukan dibagi dengan Jumlah Jumlah RDP dan kunjungan lapangan yang direncanakandi kali 30% di tambah Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim ke Bupati dan di bagi Jumlah rekomendasi DPRD ke Bupati yang direncanakan *20%.

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran dalam Renstra 2016-2021 adalah 77.27% dan terealisasi 82.17%, dengan persentase capaian 106.34%. Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja mengalami peningkatan dari yang ditargetkan. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik. 5



Sumber data bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD dari Tahun 2018-2020

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu : Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD Yang dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Pembahasan LKPJ;
- Pembahasan LHP BPK
- Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS-P
- Pembahasan APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Hambatan/ kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan dan kendala yaitu :

-  Karena adanya Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19., Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga ada beberapa kegiatan yang mendukung program sasaran ini tidak dapat dilaksanakan .

Solusi

- Mengoptimalkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD,
- Jajaran Aparatur Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan pada tahun berikutnya.

Efisiensi Anggaran

Dengan adanya Refocussing anggaran merupakan salah satu bentuk dari efisiensi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Perubahan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur khususnya pada program peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD dari 9 (sembilan) kegiatan berkurang menjadi 6 (enam) kegiatan.

✚ Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan keterbatasan tenaga yang tersedia menjadi hambatan untuk meningkatkan capaian kinerja.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel.3.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Cakupan Kinerja Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	77.27%	82.17%	106.34 %	Rp 2.374.537.800	Rp 2.293.624.700	96.59 %
Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	90%	99.98%	111.10 %	Rp 2.374.537.800	Rp 2.293.624.700	96.59%

Tabel. 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	106.34%	96.56 %	9.78%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Lembaga DPRD sebesar 106.34% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96.56%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 9,78%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

Realisasi Belanja

$$\text{Persentase efiesinesi Belanja} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \right]$$

Target Belanja

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- ❖ Terlaksananya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD ;Tersedianya anggaran untuk masing-masing kegiatan;
- ❖ Terlaksananya semua kegiatan pembahasan yang terdapat pada program peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD;

Tabel. 3.5
Capaian Kinerja Sasaran ke -1 Indikator -2

Sasaran I	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kinerja Fungsi Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD	88.33%	7%	8.40%

2. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 Indikator ke 2

➤ Cakupan Kinerja Fungsi Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD

- Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang Kedua yaitu Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang Ketiga yaitu Persentase Cakupan Fungsi Kinerja perundang-undangan terealisasi sebesar dengan **7 persen** capaian sebesar **8,40 persen**, untuk memperoleh nilai indikator ketiga ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah Ranperda yang ditetapkan dibagi jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan dibagi jumlah perda inisiatif yang disusun dikali 100%.
- Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran dalam Renstra 2016-2021 adalah 88.33% dan terealisasi 7%, dengan persentase capaian 8.40%. Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja mengalami penurunan dari yang ditargetkan. Data Tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini

➤

Grafik. 6



Sumber data Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Tahun 2018-2020

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu : Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Yang dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Rapat-Rapat Paripurna;
- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- Kumunikasi, Publikasi dan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah;
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah;
- Penyusunan Rencana Kerja.

✚ Hambatan/ kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Masih kurangnya pemahaman SDM aparatur dibidang indikator kinerja yang terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan;
- Kurangnya pemahaman Aparatur tentang output belanja secara detail merupakan parameter unuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan berkinerja;

- Adanya refocussing anggaran mengakibatkan pengurangan target dan Pengurang kegiatan dari 9 kegiatan menjadi 7 kegiatan dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19.

📌 Solusi

- Meningkatkan sumber daya manusia pada Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar wawasan dari kinerja dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.

📌 Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan keterbatasan tenaga yang tersedia menjadi hambatan untuk meningkatkan capaian kinerja.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel.3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Cakupan Kinerja Fungsi Persidangan Perundang-undangan DPRD	83,33%	7%	8.40 %	Rp 6.750.489.798	Rp 6.574.287.428	97.39 %
Program Persidangan dan Perundang-undangan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi	90%	97.06%	107.84%	Rp 6.750.489.798	Rp 6.574.287.428	97.39%

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Persidangan dan Perundang-undangan DPRD	8.40%	97.39 %	0%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Lembaga DPRD sebesar 8.40% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97.39%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

Realisasi Belanja

$$\text{Persentase efiesinesi Belanja} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \right]$$

Target Belanja

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- ❖ Kebutuhan masyarakat untuk memahami peraturan Daerah ;
- ❖ Informasi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dalam media cetak merupakan salah satu bentuk pengembangan publikasi kegiatan aAat Kelengkapan Dewan melalui media cetak dan website.

3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran serta Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

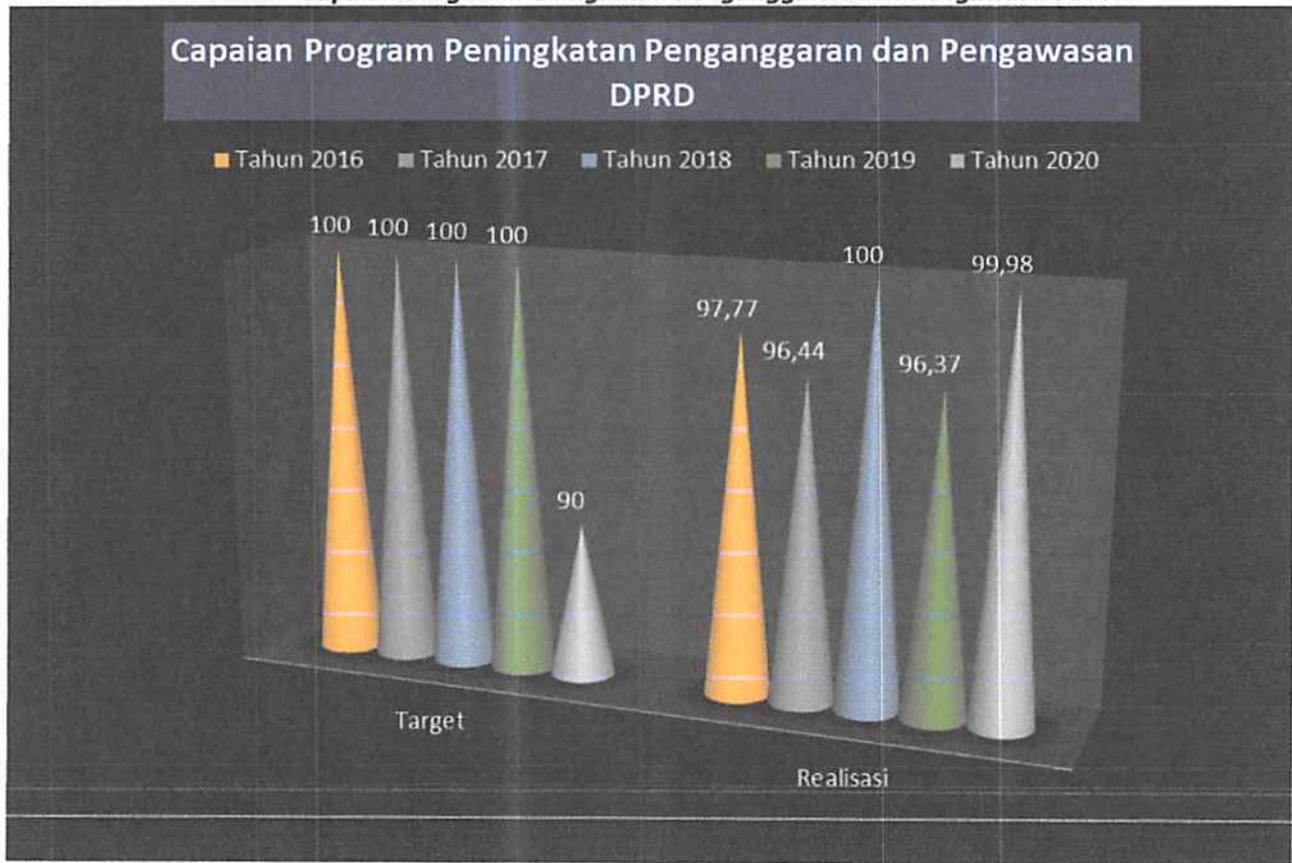
1. Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Hal yang mendasari refocussing program ini adalah semua kegiatan yang mendukung capaian program, pelaksanaannya sangat rentan terhadap penyebaran virus corona disease-19 karena melibatkan atau mengumpulkan banyak orang. Adapun kegiatan yang mendukung capaian program dapat dilihat pada tabeli berikut :

Tabel. 3.8
Capaian Indikator Kinerja Program ke -1

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Terlaksananya kinerja penganggaran dan pengawasan DPRD	Persentase Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD	90%	99.98 org	111.10 %
a.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya peran serta DPRD dan evaluasi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	1 dok	1 dok	100 %
b.	Kegiatan Rese peseorangan pimpinan dan anggota DPRD	Terwujudnya Jaringan Aspirasi masyarakat	Jumlah Jumlah rese perseorangan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD	3 kali	3 kali	100 %
c.	Kegiatan Pembahasan LKPJ	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif	Jumlah Jumlah laporan rekomendasi yang disusun bencana	1 dok	1 dok	100 %
d.	Pembahasan LHP BPK	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif	Jumlah laporan rekomendasi LHP BPK yang disusun	1 dok	1 dok	100 %
e.	Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS-P	Terlaksananya fungsi Penganggaran DPRD	Jumlah nota kesepakatan bersama	2 dok	2 dok	100 %
f.	Pembahasan APBD/APBD-P dan Ranperda pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif	Jumlah ranperda APBD/APBD-P dan ranperda pertanggungjawaban APBD	3 dok	3 dok	100 %

Grafik.7
Capaian Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD



Grafik.7 Capaian Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD

2. Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD

Adapun kegiatan yang mendukung capaian program yang ke 2 dapat dilihat pada tabeli berikut :

Tabel. 3.9
Capaian Indikator Kinerja Program ke -2

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Persidangan dan Perundang-Undangan	Terlaksananya kinerja Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD	Persentase Perda yang difasilitasi	90%	97.06 %	107.06 %

a.	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ranperda yang telah dibahas dan disetujui untuk diperdakan	Jumlah ranperda yang difasilitasi	8 ranperda	7 ranperda	87.50 %
b.	Kegiatan Rapat-Rapat paripurna	Terleksananya paripurna, disahkannya ranperda menjadi perda, tercapainya keputusan bersama	Jumlah rapat-rapat paripurna	35 kali	35 kali	100 %
c.	Kegiatan Rapat – rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya agenda kegiatan DPRD secara reguler dan meningkatnya peran serta DPRD dalam menindaklanjuti berbagai masalah pemerintah/publik	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	90 kali	90 kali	100 %
d.	Kegiatan komunikasi, publikasi dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan program dan kegiatan serta fungsi anggota DPRD	Jumlah kegiatan yang dipublikasikan	3 jenis	3 jenis	100 %
e.	Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Meningkatnya peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah pembangunan	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	65 kali	51 kali	78.46 %
f.	Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya kualitas /kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan penagawasan	Jumlah kunjungan kerja luar daerah pimpinan dan anggota DPRD	65 kali	65 kali	100 %
g.	Kegiatan penyusunan Rencana kerja	Terlaksananya program-program DPRD dalam renja DPRD	Jumlah dokumen renja tahunan DPRD	1 dok	1 dok	100%

Grafik.8
Capaian Program Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD



Sumber Data Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD

Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program **"Terlaksananya kinerja penganggaran dan pengawasan DPRD"** dengan indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD.

Target indikator program tahun 2020 adalah 90% dengan realisasi 97.98% dengan capaian 111.10%. Capaian yang melebihi target tidak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait dan ketersediaan dana.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program Peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Monitoring dan evaluasi pimpinan dan anggota DPRD, merupakan salah satu tugas pokok DPRD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan dikecamatan. Hasil monitoring tersebut akan menjadi catatan DPRD terhadap kinerja yang dilakukan eksekutif.

Target Output Kegiatan adalah meningkatnya peran serta DPRD dalam bentuk pengawasan terhadap pembangunan, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 90.48% dan menyisakan anggaran sebesar Rp 9.863.900,- Sisa anggaran terdiri dari rekening belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp 2.700.000,- dan rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 7.163.900.

- Pembahasan Pelaksanaan Kode Etik yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka ditetapkan kode etik yang berisi norma-norma atau aturan moral yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota Dewan. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 450,000,- realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
- Kegiatan Reses perseorangan pimpinan dan anggota DPRD, kegiatan ini merupakan masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, misalnya melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perorangan maupun secara berkelompok.

Target output kegiatan adalah Terwujudnya jaringan aspirasi masyarakat, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96.14% dan menyisakan anggaran sebesar 3.86% atau sebesar Rp 54.615.000,- Sisa anggaran terdiri dari belanja ATK sebesar Rp 74.000,- belanja Materai atau benda pos lainnya sebesar Rp 180.000,- belanja cetak sebesar Rp 1.200.000,- belanja penggandaan sebesar Rp 432.000,- belanja dokumentasi sebesar Rp 400.000,- belanja sewa meja kursi sebesar Rp 1.052.000,- belanja sewa tenda sebesar Rp 13.700.000,- belanja sewa sound system sebesar Rp 4,000.000,-

belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp 27.360.000,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 6.217.000,-

- Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis antara Pemerintah dan masyarakat, sehingga DPRD Kab.Luwu Timur memperoleh berbagai masukan dalam rangka membuat kebijakan pembangunan Pemerintahan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini menggunakan anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- Kegiatan Pembahasan LKPJ merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang merupakan laporan kinerja pembangunan
- selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi tingkat keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama 1 tahun.

Target Output kegiatan adalah Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 89.08% dan menyisakan anggaran sebesar 10.92%. Sisa anggaran terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 600.000,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 9.460.000,-

- Kegiatan Pembahasan LHP BPK , kegiatan merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

Target output kegiatan ini adalah terlaksananya fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96.71% dan menyisakan anggaran sebesar 3.29%. sisa anggaran terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 325.000,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 2.408.000,-

- Kegiatan Pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS-P bertujuan untuk penetapan prioritas plafon anggaran sementara, mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan meningkatkan koordinasi antar eksekutif dan legislatif dalam menetapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Target output kegiatan ini terlaksananya fungsi penganggaran DPRD. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99.61% dan menyisakan anggaran sebesar 0.39%. Sisa anggaran terdiri dari belanja ATK Rp 9.000,- belanja Penggandaan Rp 10.000,- dan belanja makanan dan minuma rapat sebesar Rp 399.000,-.
- Kegiatan APBD/APBD-P dan Ranperda pertanggungjawaban APBD yang bertujuan agar adanya penyesuaian pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam tahun berjalan, adapun tujuan dari APBD dan APBD-P guna terjadinya tertib administrasi dalam tatakelola keuangan daerah serta teranggarkannya pendapatan belanja dan pembiayaan daerah secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target output kegiatan ini adalah terlaksananya fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99.52% dan menyisakan anggaran sebesar 0.48%. Sisa anggaran terdiri dari belanja penggandaan Rp 150.000,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 985.000,- dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1.657.000,-

✓ Sasaran program ***"Terlaksananya kinerja persidangan dan perundang-undangan DPRD"*** dengan indikator kinerja program yaitu Persentase perda yang difasilitasi DPRD.

Target indikator program tahun 2020 adalah 90% dengan realisasi 97.06% dengan capaian 107.84%. Capaian yang melebihi target tidak lepas dari dukungan, kerjasama dan upaya memberikan dukungan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen DPRD untuk ikut mendukung peningkatan kinerja.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program persidangan dan perundang-undangan DPRD adalah sebagai berikut :

- Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, bertujuan untuk menghasilkan perda sebagai pedoman pemerintah daerah kab.luwu timur menjalankan fungsi eksekutif untuk menatakelola pemerintahan, menatakelola sumber daya dan menata kelola prilaku budaya untuk kesejahteraan masyarakat Kab.Luwu Timur.

Target Output Kegiatan adalah Ranperda yang dibahas dan disetujui untuk diperdakan, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 98.86% dan menyisakan anggaran sebesar 1.14% atau Rp 13.786.157,- Sisa anggaran terdiri dari rekening belanja penggandaan sebesar Rp 900,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 5.790.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 7.995.257,-

Keberhasilan pencapaian indikator ini ikut didukung dengan kerjasama dan upaya memberikan dukungan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen DPRD untuk ikut mendukung peningkatan kinerjanya.

➤ Adapun Perda yang disetujui DPRD dan di tetapkan bersama Bupati kab.Luwu Timur adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum Daerah;
2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah No : 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan;

4. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten luwu Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat Cabang Malili;
5. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019;
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Ta 2020;
7. Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021.

Manfaat dari Peraturan daerah yang dihasilkan adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kab.Luwu timur menjalankan fungsi eksekutif untuk menata kelola Pemerintahan, menata kelola sumber daya dan menata kelola prilaku dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

- Penyusunan Perda inisiatif realisasi 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan, sehingga mempengaruhi indikator ketiga pada sasaran satu;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan realisasi 0%. Hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan;
- Kegiatan Rapat-rapat paripurna merupakan rapat anggota yang di pimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang tugas DPRD dalam

pelaksanaan rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh paling sedikit 3 pimpinan DPRD.

Target Output Kegiatan adalah terlaksananya paripurna, disahkannya ranperda menjadi perda, tercapainya kebijakan/keputusan bersama DPRD, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 84.39% dan menyisakan anggaran sebesar 15.61% atau Rp. 23.00.500,- Sisa anggaran terdiri dari rekening belanja upah kerja sebesar Rp 10.600.000,- belanja cetak sebesar Rp 1.200.000,- belanja sewa meja dan kursi sebesar Rp 400.000,- belanja sewa tenda sebesar Rp 1.050.000,- belanja sewa alat studio sebesar Rp 3.000.000,- belanja makana dan minuman rapat sebesar Rp 6.755.000,-

- Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, kegiatan ini telah terfasilitasi rapat pimpinan DPRD, komisi- komisi Bapemperda Bamus, BK, Banggar dan fraksi.

Target Output Kegiatan adalah terlaksananya agenda kegiatan DPRD secara reguler dan meningkatkan peran serta DPRd dalam menindaklanjuti berbagai masalah pemerintah/publik, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96.80% dan menyisakan anggaran sebesar 3.20% atau Rp 86.613.714,- Sisa anggaran terdiri dari rekening ATK sebesar Rp 824.000,- belanja sewa mobilitas air sebesar Rp 500.000,- belanja makan dan minuman rapat sebesar Rp 25.875.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 59.786.550,- belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 493.866,-

- Kegiatan komunikasi, publikasi dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD bertujuan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan pimpinan dan anggota dewan melalui media cetak maupun elektronik.

Target Output Kegiatan adalah terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan program dan kegiatan serta tugas dan fungsi DPRD, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99.94% dan menyisakan anggaran sebesar 0.6% atau Rp 325.000,- Sisa anggaran terdiri dari rekening ATK sebesar Rp 325.000,-

- Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah adalah untuk menindaklanjuti masalah pembangunan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di kecamatan.

Target Output Kegiatan adalah meningkatnya peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah pembangunan, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 76.71% dan menyisakan anggaran sebesar 23.29% atau Rp 50.835.200,- Sisa anggaran terdiri dari rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 50.835.200,-

- Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah merupakan perjalanan dinas diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kegiatan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisa kondisi daerah yang menjadi target perencanaan selanjutnya dari hasil pertimbangan tersebut menjadi dasar menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta membuat proyeksi keadaan dimasa depan.

Target Output Kegiatan adalah meningkatnya kualitas/kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99.91% dan menyisakan anggaran sebesar 0.09% atau Rp 1.637.299,- Sisa anggaran terdiri dari rekening belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1.637.299,-

- Kegiatan penyusunan renja DPRD bertujuan untuk menyediakan instrumen bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah ,efisien dan efektif sesuai dengan mndat yang diberikan.

Target Output Kegiatan adalah terlaksanya program-program DPRD dalam renja DPRD, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 100%.

Tabel 3.10

**Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Urusan Pelaksanaan Urusan Penunjang
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab.Luwu Timur
Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD. PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Baguan Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	93,15%	program pelayanan administrai perkantoran di targetka 100% akan tetapi realisasi capaian kinerja hanya mencapai 93,15% , dikarenakan ada beberapa kegiatan yang targetnya tidak tercapai.		
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> - Jumlah surat yang dihasilkan	120 lbr	100%			
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> - Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	36.rek	100%			
				<i>Penyediaan Jasa Kebersihan kantor</i> - Jumlah alat dan bahan pembersih yang disiapkan - Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan	2 jenis 20 orang	100% 100%			
				<i>Penyediaan Jasa perbaikan</i>	146 unit	100%			

				<i>peralatan kerja</i>					
				<i>- Jumlah tenaga kerja yang dipelihara</i>					
				<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	33 jenis	100%			
				<i>- Jumlah jenis ATK yang disediakan</i>					
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	9 jenis	100%			
				<i>- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</i>					
				<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>					
				<i>- Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan</i>	2.124 kotak	100%			
				<i>- Jumlah prasmanan makana dan minum tamu yang disediakan</i>	5.950 porsi	98,32%			
				<i>Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>					
				<i>- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>	17.220 exp	100%			
				<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>					
				<i>- Jumlah logistik rumah jabatan yang disediakan</i>	2 jns	100%			
				<i>- Jumlah BBM yang disediakan</i>	8.419 ltr	76,24%	<i>Pada kegiatan ini target tdk mencapai 100% dikarenakan adanya rekening belanja Bahan Bakar Minyak</i>	<i>Untuk target kegiatan ini akan dilakukan pengurangan target yang disesuaikan dengan kebutuhan</i>	

						(BBM) yang tdk mencapai target disebabkan jumlah BBM genset yang bersifat variabel tergantung dari pemakaian operasional kantor	di tahun 2021	
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan					
			- Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang Terpenuhi	2 jenis	100%			
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	69 kali	100%			
			- Jumlah kordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan					
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknisi	37 orang	100%			
			- Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan					
			Monitoring dan Evaluasi	4 dok	100%			
			- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun					
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	85 kali	56,47%	Kegiatan ini tdk mencapai target karena adanya covid-19 sehingga kegiatan ini tdk bs berjalan maksimal.	akan di lakukan Pengurangan Target dan pengurangan Anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut	
			- Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan					
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan dan	30 orang	66,67%	Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD	Pada tahun 2021 akan dilakukan penentuan jadwal medical check-up	

			Anggota DPRD			dengan jadwal Medical Check-Up.	lebih awal dari tahun 2020 sehingga dapat mengakomodir jadwal Mcu anggota DPRD dengan agenda kegiatannya.	
			- Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan general check-up					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2 jenis	100%			
			- Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disiapkan					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%			
			Pembangunan Rumah Jabatan	3 unit/paket	100%			
			- Jumlah rumah jabatan pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD yang terbangun					
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6 unit/paket	100%			
			- Jumlah prasarana rumah jabatan yang disediakan					
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor-	11 unit/paket	100%			
			- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	3 unit/paket	100%			

			- Jumlah pemeliharaan, gedung, taman dan halaman rujab yang dipelihara					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah pemeliharaan gedung, taman halaman gedung kantor yang dipelihara	2 unit	100%			
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan berfungsi baik	11 unit	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	100%			
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - Jumlah pengadaan pakaian dinas anggota DPRD	30 psg	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	85%	100%			
			<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> - Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	19 orang	100%			

				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%			
				<i>Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</i> <i>- Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun</i>	1 dok	100%			
				<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i> <i>- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun</i>	2 dok	100%			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	100%	100%			
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Panganggaran SKPD</i> <i>- Jumlah dokumen perencanaan dan panganggaran yang tersusun</i>	6 dok	100%			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	100%	100%			
				<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan bagi Pimpinan dan anggota DPRD</i>	2 kali	100%			

				- Jumlah bimtek yang diikuti oleh pimpinan dan anggota					
				Penyediaan jasa konsultasi/Tenaga ahli bagi Pimpinan dan anggota DPRD - Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	6 orang	100%			
				PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD	90%	99,30%			
				Pembahasan rancangan Peraturan Daerah - Jumlah ranperda yang difasilitasi	8 ranperda	87,50%	Kegiatan ini target tidak mencapai 100% disebabkan 1 ranperda masih dalam proses pembahasan	Mengikuti perkembangan dan evaluasi terhadap Ranperda yang masih dalam tahap pembahasan.	
				Rapat-Rapat Paripurna - Jumlah rapat-rapat paripurna	35 kali	100%			
				Rapat-Rapat alat kelengkapan Dewan - Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	90 kali	100%			
				Komunikasi, Publikasi dan Keprotokoleran Pimpinan dan anggota DPRD - Jumlah kegiatan yang dipublikasikan	3 jenis	100%			
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah	65 kali	78,46%	Dari target 65 kali yang terealisasi hanya 51 kali atau 78,46% . Kegiatan	kegiatan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2021	

			- Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan			ini tdk mencapai target karena adanya covid-19 sehingga kegiatan ini tdk bs berjalan maksimal		
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah - Jumlah kunjungan kerja luar daerah pimpinan dan anggota DPRD	65 kali	100%			
			Penyusunan Rencana Kerja DPRD - Jumlah dokumen renja tahunan DPRD	1 dok	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD	90%	99,98%			
			Monitoring dan evaluasi Pimpinan dan anggota DPRD - Jumlah monitoring dan evaluasi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	1 dok	100%			
			Reses Perseorangan Pimpinan dan anggota DPRD - Jumlah reses perseorangan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD	3 kali	100%			
			Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama - Jumlah hearing/dialog yang dilaksanakan	0	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan		

							Covid- 19		
				Pembahasan LKPJ					
				- Jumlah laporan rekomendasi yang disusun	1 dok	100%			
				Pembahasan LHP-BPK					
				- Jumlah laporan rekomendasi LHP BPK yang disusun	1 dok	100%			
				Pembahasan Kua PPAS/KUPA PPAS-P					
				- Jumlah nota kesepakatan yang ditetapkan bersama	2 dok	100%			
				Pembahasan APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD					
				- Jumlah ranperda APBD/APBD-P dan ranperda pertanggungjawaban APBD	3 dok	100%			

TABEL. 3.11.
CAPAIAN PROGRAM RUTIN
TAHUN 2020

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	92,92%	92,92%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	98,76%	98,76%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	99,39%	99,39%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	88,96%	88,96%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase rata-rata tersedianya laporan keuangan dan kinerja OPD, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	92,42%	92,42%

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Tersedianya laporan renja dan anggaran OPD	100%	100%	100%
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah dokumen pembahasan Ranperda yang dihasilkan	100%	95,17%	95,17%
Rata-Rata capaian				94,40

Adapun ulasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Program Rutin Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian target indikator kinerja dapat terealisasi
 2. Rata-rata capaian target program rutin terealisasi hampir sesuai target yang direncanakan
 3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun target-target indikator.
- a) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan program yang sama seperti pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL. 3.12

**PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM RUTIN TAHUN 2019
DENGAN TAHUN 2020**

URAIAN	INDIKATOR	REALISASI		KETERANGAN
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	88,03%	92,92%	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,02%	98,76%	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan sarana kedisiplinan aparatur	76,55%	99,39%	
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur	88,16%	88,96%	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase rata-rata tersedianya laporan keuangan dan kinerja OPD, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	77,74%	92,42%	

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Tersedianya laporan renja dan anggaran OPD	83,29%	93,31%	
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah dokumen pembahasan Ranperda yang dihasilkan	96,65%	95,17%	

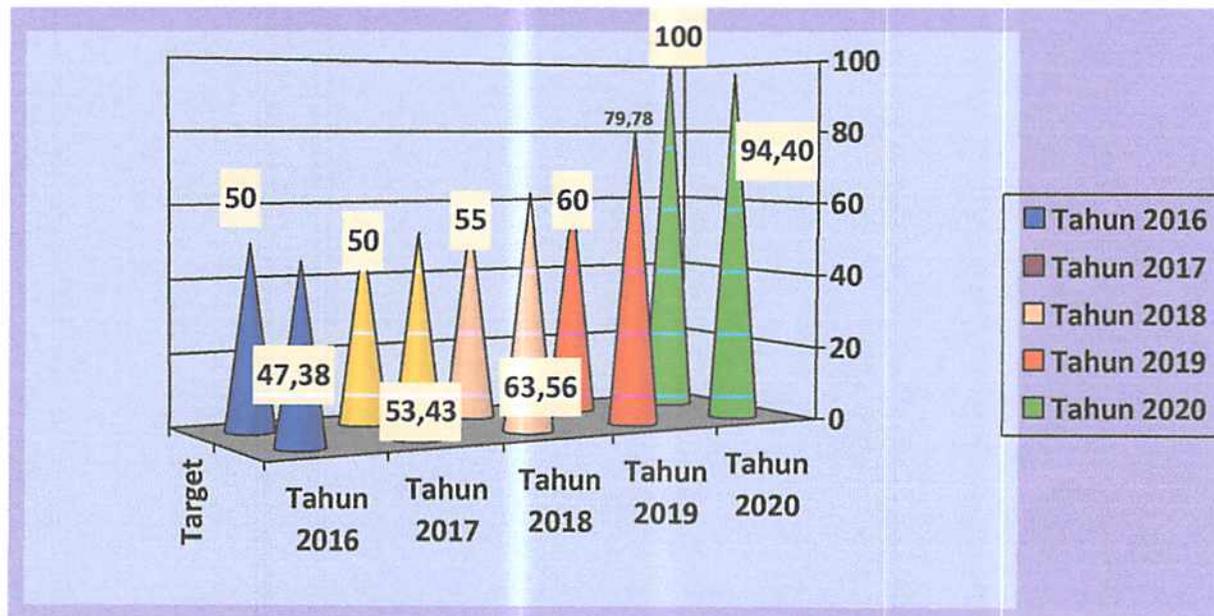
Bila dilihat tabel di atas kinerja program rutin cenderung relative hampir sama dengan realisasi kinerja Tahun 2020 . Selain itu juga adanya perubahan paradigma dan budaya kerja dan motivasi juga semangat dalam bekerja bagi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- c). Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL. 3.13
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2016
DAN REALISASI TAHUN 2020

URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	KET.
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Program Rutin	47,38	53,43	63,56	79,78	94,40	

Grafik 9 Perbandingan Realisasi Program Rutim Tahun 2016,2017,2018,2019 dan 2020



Dengan melihat grafik 9 perbandingan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 maka capaian kinerja mengalami peningkatan karena dilaksanakan rencana operasional yang dijadwalkan tepat waktu dan pelaksanaan Program/Kegiatan ini dilaksanakan di bagian Umum dan Keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan diprioritaskan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan melihat perbandingan realisasi Tahun 2016 sampai dengan realisasi tahun sebelumnya yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja, maka dapat diprediksi pada akhir masa RPJMD pada Tahun 2021 dapat tercapai.

- d). Untuk Program rutim ini dilihat dari total belanja terjadi efisiensi anggaran pada Tahun 2020. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 ini adalah sebesar Rp. **7,661,852,050,-** dan setelah perubahan anggaran mengalami **efisiensi menjadi Rp. 7,103,528,200,-** dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **6,752,802,153,-** atau **95,06** persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **94,40%** .

e). Berkaitan dengan ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Luwu Timur melaksanakan 7 (Tujuh) program yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan;
- 6) Program Perencanaan dan penganggaran SKPD;
- 7) Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

B. Realisasi Anggaran

Pendapatan

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14,651,434,175,- Realisasi sebesar Rp. 13,870,912,099,-(94,67%) sisa Rp. 780,522,076,-

Belanja Langsung

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran Rp. 3,329,248,850,- Realisasi Rp. 3,093,578,200, atau (92,92%) Sisa Rp. 235,670,650,-
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran Rp. 2,061,547,450,- Realisasi Rp. 2,035,915,283,-atau (98,76%) Sisa Rp. 25,632,167,-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur anggaran Rp. 246,000,000,- realisasi Rp. 244,492,000,- atau(99,39%) sisa Rp. 1,508,000,-;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran Rp. 2,061,547,450,- Realisasi Rp. 2,035,915,283,-atau (98,76%) Sisa Rp. 25,632,167,-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur anggaran Rp. 246,000,000,- realisasi Rp. 244,492,000,- atau(99,39%) sisa Rp. 1,508,000,-;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran Rp. 268,303,200,- Realisasi Rp. 238,681,174,- (88,96 %) sisa Rp. 29,622,026,-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan anggaran Rp. 9,230,000,-realisasi Rp. 8,530,000 (92,42%) sisa Rp. 700,000,-
- Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD anggaran Rp. 6,725,100,- realisasi Rp6,275,100,- (93,31%) sisa Rp. 450,000,-
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran Rp. 1,182,473,600,- realisasi Rp. 1,125,330,396,-(95,17%) sisa Rp. 57,143,204,-

Berikut ini kegiatan – kegiatan yang realisasinya di bawah 80%

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran sebesar Rp. 500,112,000,- realisasi Rp. 406,777,516,- atau 81,34%, hal ini disebabkan karena pada rekening belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung dari pemakaian operasional kantor dan rujab.
2. Kunjungan kerja dalam daerah anggaran sebesar Rp. 59,462,250,- realisasi Rp. 21,145,850,- atau 35,56%, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran untuk kegiatan ini 35,56%,di karenakan adanya covid-19 sehingga kegiatan tdk berjalan maksimal

3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD anggaran sebesar Rp. 180,000,000,- realisasi Rp. 124,000,000 atau (69,42),- hal ini disebabkan karena sulitnya menyesuaikan agenda Anggota Dewan dengan jadwal MCU.
4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas anggaran sebesar Rp. 96,000,000,- realisasi Rp. 85,025,000,- atau 88,57,- hal ini disebabkan karena dikarenakan anggaran untuk pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas disesuaikan standar harga yang ada di Ekatalog.
5. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran anggaran sebesar Rp. 5,000,000,- realisasi Rp. 4,300,000,- atau (86,00) disebabkan karena adanya rekening belanja yang tidak terealisasi seperti rekening belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 690,000,- disebabkan padatnya kegiatan yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan rapat tdk dapat dilaksanakan.

TABEL 3.14

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM URUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				KENDALA/	PERANGKAT
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIA TAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	MASALAH	DAERAH
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9		10
	BELANJA	30.879.989.973,00	29.491.626.380,00	95,50						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.651.434.175,00	13.870.912.099,00	94,67						
1	Belanja Pegawai	14.651.434.175,00	13.870.912.099,00	94,67	Jumlah orang bulan PNS yang menerima gaji dan tunjangan	53	ob	53		Sekretariat DPRD

1,1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14.651.434.175,00	13.870.912.099,00	94,67						
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.973.739.100	1.708.904.540	86,58						
	Tunjangan Keluarga	218.720.982,10	185.084.284	84,62						
	Tunjangan Jabatan	1.034.313.000,00	1.008.568.500	97,51						
	Tunjangan Fungsional Umum	45.346.000	35.940.000	79,26						
	Tunjangan Beras	173.048.063,16	153.675.240	88,80						
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	314.960.679,18	266.814.270	84,71						
	Pembulatan Gaji	35.875	14.765	41,16						
	uang paket	60.461.100	57.582.000	95,24						
	tunjangan badan kehormatan	103.691.385	86.919.525	83,83						
	tunjangan alat kelengkapan lainnya	14.747.316,15	7.901.775	53,58						
	tunjangan perumahan	2.106.000.000	2.106.000.000	100,00						
	uang jasa pengabdian	134.898.674,41	-	-						
	belanja penunjang oprasional pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000	100,00						
	Tunjangan Transportasi	2.640.600.000	2.640.600.000	100,00						

	tunjangan reses	945.000.000	913.500.000	96,67						
	tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	904.272.000	717.807.200	79,38						
	belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000	3.780.000.000	100,00						
	BELANJA LANGSUNG	16.228.555.798	15.620.714.281	96,25						
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.329.248.850	3.093.578.200	92,92	Persentase Rata-rata Pencapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran.	34.307		32.260		Sekretariat DPRD
2,1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.190.000	10.171.000	99,81	Jumlah surat Yang Dihasilkan	120	surat	120		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.790.000	4.774.000	99,67						
	Belanja Perangko ,Materai dan Benda Pos Lainnya	5.400.000	5.397.000	99,94						

2,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.112.000	406.777.516,00	81,34	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi ,SDA,dan Listrik yang Terbayarakan	36	rekening	36		Sekretariat DPRD
	Belanja Telephone	57.000.000	39.896.808	69,99						
	Belanja Air	38.592.000	29.237.700	75,76						
	Belanja Listrik	400.320.000	333.598.008	83,33						
	Belanja Kwat/faksimal/Internet/Intranet/TV/Kabel/TV Satelit	4.200.000	4.045.000	96,31						
2,3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	-	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	0		0		Sekretariat DPRD
	Belanja Premi asuransi barang milik	-	-	-						

	daerah									
2,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	295.270.000	293.267.000	99,32						
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	46.270.000	46.267.000	99,99	Jumlah Alat Dan bahan kebersihan yang disediakan	20	org	20		Sekretariat DPRD
	Belanja Jasa Upah Kerja	249.000.000	247.000.000	99,20	Jumlah tenaga Kebersihan yang Terbayarkan					
2,5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	110.250.000	110.175.000	99,93	Jumlah Peralatan Kerja Yang Dipelihara	146	unit	146		Sekretariat DPRD
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.250.000	110.175.000	99,93						
2,6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.133.000	81.133.000	100,00	Jumlah Jenis ATK	33	Jenis	33		Sekretariat DPRD

					Yang Disediakan					
	Belanja Alat Tulis Kantor	81.133.000	81.133.000	100,00						
2,7	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	66.300.100	66.300.000	100,00	Jumlah Penunjang Administrasi	2	Jenis	2		Sekretariat DPRD
					Kesekretariatan SKPD Yang Terpenuhi					
	Belanja Cetak	31.300.000	31.300.000	100,00						
	Belanja Pengadaan	35.000.100	35.000.000	100,00						
2,8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.659.000	99,15	Jumlah komponen insatalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	9	Jenis	9		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)	40.000.000	39.659.000	99,15						

2,9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.250.000	8.138.000	99	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	2	Jenis	2		Sekretariat DPRD
	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.250.000	5.180.000	99						
	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan	3.000.000	2.958.000	99						
2.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	201.900.000	201.900.000	100,00	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	17.220	Eksp	17.220		Sekretariat DPRD
	Belanja Surat Kabar/Majalah	201.900.000	201.900.000	100,00						
2.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.050.500	618.775.600	95,78	Jumlah Liter BBM yangh Disediakan	8.419	Liter	6.419		Sekretariat DPRD
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.700.500	54.775.600	96,61						

	Belanja Bahan /Perengkapan Rumah Tangga	564.000.000	564.000.000	100,00						
	Belanja upah kerja	9.000.000	-	-						
	belanja sewa meja dan kursi	3.150.000	-	-						
	Belanja sewa tenda	4.200.000	-	-						
	Belanja sewa alat studio	9.000.000	-	-						
2.12	Penyediaan Makan Dan Minuman	258.250.000	257.799.000	99,83	Jumlah Makan Dan Minum Tamu	2.125	Kotak	2.125		Sekretariat DPRD
					,Rapat Yang Disediakan					
	Belanja Makan Dan Minum Rapat	9.900.000	9.700.000	97,98						
	Belanja Makan Dan Minum Tamu	248.350.000	248.099.000	99,90		5950	porsi	5.950		
2.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	426.850.000	426.160.134	99,84	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	69	kali	69		Sekretariat DPRD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	426.850.000	426.160.134	99,84						

2.14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	430.000.000	412.000.000	95,81	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi /Tehknis Yang Terbayarkan	37	Org	37		Sekretariat DPRD
	Belanja Jasa Sopir	120.000.000	120.000.000	100,00						
	Belanja jasa Pengelolaan Administrasi	310.000.000	292.000.000	94,19						
2.15	Monitoring dan Evaluasi	15.231.000	15.219.500	99,92	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	4	Dok	4		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	6.461.600	6.460.100	99,98						
	Belanja Penggandaan	3.869.400	3.869.400	100,00						
	Belanja Jilid	1.000.000	990.000	99,00						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	3.900.000	100,00						

2.16	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	59.462.250	21.145.850	35,56	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah Yang Dilaksanakan	85	kali	48		Sekretariat DPRD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.462.250	21.145.850	35,56						
2.17	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD	180.000.000	124.957.600	69,42	Jumlah Pimpinana Dan Anggota				- Belum adanya kesesuaian waktu atau jadwal antara DPRD dgn jadwal MCU	
					DPRD Yang Melakukan Generasi	30	Org	20		
					Chek Up					
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	180.000.000	124.957.600	69,42						

3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.061.547.450	2.035.915.283	98,76	Persentase Rata-rata Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36	Unit/Paket	27		Sekretariat DPRD
3,1	Pembangunan Rumah Jabatan	1.480.990.000	1.471.399.052	99,35	Jumlah Rumah Jabatan Pimpinan					
					DPRD, Wakil Ketua DPRD Yang	3	Unit	3		Sekretariat DPRD
					terbangun					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.480.990.000	1.471.399.052	99,35						

3,2	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-		0	0	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19	Sekretariat DPRD
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	-						
3,3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinaas	96.000.000	85.025.000	88,57	Jumlah Prasarana Rumah Jabatan yang diadakan	6	Paket	6		Sekretariat DPRD
	Belanja Bahan Perlengkapan Rumah	-	-	-						

	Tangga								
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat pendingin	66.000.000	65.625.000	99,43					
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	30.000.000	19.400.000	64,67					
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- PengadaanMeja Rapat Pejabat	-	-	-					
3,5	<i>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	47.000.000	46.024.000	97,92	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	11	Paket	11	Sekretariat DPRD
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	47.000.000	46.024.000	97,92					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-					

3,6	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan	130.000.000	129.315.500	99,47	Jumlah Pemeliharaan Gedung , Taman Dan Halaman Rujab Yang dipelihara	3	Unit	3		Sekretariat DPRD
	Belanja Pেমeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000	129.315.500	99,47						
3,7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	140.557.450	139.639.500	99,35	Jumlah Pemeliharaan Gedung ,Taman Dan Halaman Gedung Kantor	2	Gedung	2		Sekretariat DPRD
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.557.450	139.639.500	99,35						

3,8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167.000.000	164.512.231	98,51	Jumlah kendaraan dinas Oprasional yang dipelihara Dan Berfungsi Baik	11	uint	11		Sekretariat DPRD
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.200.000	15.887.681	98,07						
	Belanja Jasa Service	9.100.000	8.965.461	98,52						
	Belanja Penggantian Suku Cadang	124.400.000	122.717.244	98,65						
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.300.000	16.941.845	97,93						
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	246.000.000	244.492.000	99,39	Persentase Rata-Rata Peningkatan Sarana Kedisiplinan Aparatur .	30	org	30		Sekretariat DPRD

4,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	246.000.000	244.492.000	99,39	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	30	Org	30		Sekretariat DPRD
					Anggota DPRD					
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	61.500.000	61.248.000	99,59						
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	93.000.000	92.065.000	98,99						
	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	91.500.000	91.179.000	99,65						
4,2	<i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu</i>	-	-	-	0	0	0	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam	Sekretariat DPRD

									Rangka Penanganan Covid- 19	
	Belanja Pakaian Adat Daerah									
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	268.303.200	238.681.174	88,96	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur.	19	org	19		Sekretariat DPRD

5,1	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	268.303.200	238.681.174	88,96	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Tehknis	19	Org	19	realisasi anggaran untuk kegiatan ini 88,96%, dikarenakan adanya rekening belanja perjalanan dinas luar daerah yang tdk terealisasi di sebabkan waktu pelaksanaan bimtek ini terbentur dengan kegiatan lain sehingga kegiatan bimtek ini tdk	Sekretariat DPRD
-----	---	-------------	-------------	-------	--	----	-----	----	--	------------------

6,1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	4.300.000	86,00	Jumlah Laporan Keuangan Semester-eran Dan Akhir Tahun Yang Disusun	2	Dok	2		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000	2.230.000	99,55						
	Belanja Makan Dan Minum Rapat	2.760.000	2.070.000	75,00						
6,2	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4.230.000	4.230.000	100,00	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1	Dok	1		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000	1.300.000	100,00						
	Belanja Penggandaan	2.280.000	2.280.000	100,00						
	Belanja Jilid	200.000	200.000	100,00						
	Belanja Mkan dan Minum Rapat	450.000	450.000	100,00						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-							

LAKIP TAHUN 2020 SEKRETARIAT DPRD

7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	6.725.100	6.275.100	93,31	Persentase Tersedianya Laporan Renja Dan Anggaran OPD.	6	dok	6		Sekretariat DPRD
7,1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dari Penganggaran SKPD</i>	6.725.100	6.275.100	93,31	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6	Dok	6		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.034.300	3.034.300	100,00						
	Belanja Penggandaan	2.590.800	2.590.800	100,00						
	Belanja Jilid	200.000	200.000	100,00						
	Belanja Makan dan Minum Rapat	900.000	450.000	50,00						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-							

8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.182.473.600	1.125.330.396	95,17	Jumlah Dokumen Pembahasan Ranperda Yang Dihasilkan.	7	kali/org	7		Sekretariat DPRD
8,1	<i>Pimpinan Dan Anggota DPRD</i>	894.043.600	838.210.396	93,75	Jumlah Bimtek Yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggotya DPRD	2	kali	2		Sekretariat DPRD
	Belanja Perajalanan Dinas Luar Daerah	494.043.600	443.710.396	89,81						
	Belanja Bimbingan Tehknis	400.000.000	394.500.000	98,63						
8,2	<i>Penyediaan jasa konsultasi /Tenaga Ahli Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	288.430.000	287.120.000	99,55	Yang Jumlah Pakar Yang Disediakan	5	Org	5		Sekretariat DPRD
	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	252.000.000	252.000.000	100,00						
	Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan	-	-	-						
	Belanja Sewa Sarawan Mobilitas Darat	-	-	-						

	Belanja Sewa Sarana Mobillitas Udara	-	-	-						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.430.000	35.120.000	96,40						
9	PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD	6.750.489.798	6.574.287.428	97,39	Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi.	267	Ranperda, Jenis dan kali	252		Sekretariat DPRD
9,1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.211.063.700	1.197.277.543	98,86	Jumlah Ranperda Yang Difasilitasi	8	Ranperda	7		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.443.700	4.443.700	100,00						
	Belanja Pengadaan	2.250.000	2.249.100	99,96						
	Belanja Makan Dan Minum RAPAT	15.000.000	9.210.000	61,40						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.189.370.000	1.181.374.743	99,33						

9,2	Penyusunan Perda Inisiatif DPRD	-	-		Jumlah Ranperda Inisiatif Yang Difasilitasi	0	0	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19	Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-							
	Belanja Pengadaan	-	-							
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-							
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-							
	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen	-	-							

9,3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Sosialisai Rancangan Perda	0	Perda	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19	Sekretariat DPRD
	Belanja Pengadaan	-	-	-						
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	-	-						
9,4	Rapat-Rapat paripurna	147.330.000	124.325.000	84,39	Jumlah Rapat-rapat Paripurna	35	Kali	35		Sekretariat DPRD

LAKIP TAHUN 2020 SEKRETARIAT DPRD

	Belanja Jasa Upah Kerja	17.600.000	7.000.000	39,77					
	Belanja Cetak	1.200.000	-	-					
	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000	-	-					
	Belanja Sewa Tenda	1.050.000	-	-					
	Belanja Sewa Alat Studio	3.000.000	-	-					
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124.080.000	117.325.000	94,56					
9,5	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	2.709.892.098	2.623.278.384	96,80	Jumlah Rapat-rapat Kelengkapan Dewan	90	Kali	90	Sekretariat DPRD
	Belanja ATK	1.108.298	1.100.000	99,25					
	Belanja Pengadaan	2.250.000	2.250.000	100,00					
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000	9.500.000	95,00					
	Belanja Makan Dan Minuman Rapat	174.000.000	148.125.000	85,13					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	463.783.800	403.997.250	87,11					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.058.750.000	2.058.306.134	99,98					

9,6	Komunikasi ,Publikasi Dan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD	571.700.000	571.375.000	99,94	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasi	3	Jns	3		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000	4.925.000	93,81						
	Belanja Bahan Perlombaan/Plakat	40.800.000	40.800.000	100,00						
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	444.000.000	444.000.000	100,00						
	Belanja Cetak	81.650.000	81.650.000	100,00						
	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	-	-	-						
9,7	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	218.310.000	167.474.800	76,71	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	65	kali	51	- Realisasi keuangan tidak mencapai 100% oleh karena padatnya jadwal kegiatan DPRD sehingga waktu untuk melakukan	Sekretariat DPRD

									kunker dalam daerah terbatas	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	218.310.000	167.474.800	76,71						
9,8	<i>Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah</i>	1.888.020.000	1.886.382.701	99,91	Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan	65	kali	65		Sekretariat DPRD
	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah	1.888.020.000	1.886.382.701	99,91						
9,9	<i>Penyusunan Rencana Kerja DPRD</i>	4.174.000	4.174.000	100,00	Jumlah Dokumen Renja Tahunan	1	Dok	1		Sekretariat DPRD

					DPRD					
	Belanja Aslat Tulis Kantor	1.359.000	1.359.000	100,00						
	Belanja Pengadaan	315.000	315.000	100,00						
	Belanja Jilid	250.000	250.000	100,00						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000	2.250.000	100,00						
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD	2.374.537.800	2.293.624.700	96,59	Persentase Penetapan Dokumen ,Perencanaan,P anggaran Dan Rekomendasi Hasil Pengawasan.	11	kali dan dokumen	11		Sekretariat DPRD
10,1	Monitoring Dan Evaluasi Evaluasi Pimpinan Dan Anggota DPRD	103.585.000	93.721.100	90,48	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang	1	dok	1		Sekretariat DPRD

LAKIP TAHUN 2020 SEKRETARIAT DPRD

					Dilaksanakan					
	Belanja makan dan minum rapat	2.700.000	-	-						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.885.000	93.721.100	92,90						
10,2	Pembahasan Pelaksanaan Kode Etik DPRD	450.000	-	-	0	0	0	0	-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan	Sekretariat DPRD

									Covid- 19	
	Belanja Pengadaan	-	-	-						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000	-	-						
	Belanja Perjalanan Dinas Diluar Daerah	-	-	-						
10,3	Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.415.857.000	1.361.242.000	96,14	Jumlah Reses Perseorangan Yang Dilaksanakan Pimpinan Dan Anggota DPRD	3	kali	3		Sekretariat DPRD
	Belanja Atk	2.997.000	2.923.000	97,53						
	Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya	1.260.000	1.080.000	85,71						

	Belanja Cetak	54.000.000	52.800.000	97,78						
	Belanja Pengadaan	19.440.000	19.008.000	97,78						
	Belanja Dokumentasi	18.000.000	17.600.000	97,78						
	Belanja Sewa Meja Kursi	61.560.000	60.508.000	98,29						
	Belanja Sewa tenda	189.000.000	175.300.000	92,75						
	Belanja Sewa Alat Studio	90.000.000	86.000.000	95,56						
	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan	820.800.000	793.440.000	96,67						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.800.000	152.583.000	96,09						
10,4	<i>Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan</i>								-kegiatan tdk berjalan karena Adanya	Sekretariat DPRD

	<i>Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama</i>	-	-	-	0	0	0	0	Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/S J dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19
	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-					
	Belanja Cetak	-	-	-					
	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	-	-	-					
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-					
	Belanja Sewa Sarana Mibilitas Udara	-	-	-					
	Belanja Makanan Dan Minuman	-	-	-					

	Kegiatan									
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-						
10,5	Pembahasan LKPJ	92.113.400	82.053.200	89,08	Jumlah Laporan Rekomendasi Yang Disusun	1	Dok	1	realisasi anggaran untuk kegiatan ini 89,08 %,di karenakan sisa anggaran belanja dari rekening belanja Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 9,460,200,- dan rekening belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 600,000,- disebabkan	Sekretariat DPRD

									waktu yang terbatas untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000	20.000.000	100,00						
	Belanja Pengadaan	3.900.000	3.900.000	100,00						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.500.000	29.900.000	98,03						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.713.400	28.253.200	74,92						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-						
10,6	Pembahasan LHP BPK	83.173.400	80.440.400	96,71	Jumlah Laporan Rekomendasi LHP	1	Dok	1		Sekretariat DPRD

					BPK Yang Disusun					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000	12.000.000	100,00						
	Belanja Pengadaan	3.900.000	3.900.000	100,00						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.800.000	37.475.000	99,14						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.473.400	27.065.400	91,83						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-						
10,7	Pembahasan KUA /PPAS PPAS-P	103.069.000	102.670.000	99,61	Jumlah KUA PPAS Yang di Bahas	2	Dok	2		Sekretariat DPRD
	Belanja Alatb Tulis kantor	1.459.000	1.450.000	99,38						
	Belanja Pengadaan	8.010.000	8.000.000	99,88						
	Belanja makanan Dan minum Rapat	93.600.000	93.220.000	99,59						

10,8	Pembahasan APBD/APBD-P Dan Ranperda Pertanggung jawaban APBD	576.290.000	573.498.000	99,52	Jumlah Ranperda APBD /ABPD P Dan Ranperda Pertanggung jawaban APBD	3	Dok	3		Sekretariat DPRD
	Belanja Pengadaan	57.990.000	57.840.000	99,74						
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	217.500.000	216.515.000	99,55						
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.800.000	299.143.000	99,45						
10,9	<i>Pembahasan Laporan Semester Dan Prognosis</i>	-	-	0		0	0	0		Sekretariat DPRD
	Belanja Alat Tulis kantor	-	-							
	Belanja Pengadaan	-	-							
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-							

Dengan melihat perbandingan realisasi Tahun 2016 sampai dengan realisasi tahun sebelumnya yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja, maka dapat diprediksi pada akhir masa RPJMD pada Tahun 2021 dapat tercapai.

TABEL 3.14
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SEKRETARIAT DPRD TA 2020

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	Pendapatan	-	-	-
2	Belanja tidak langsung	14,651,434,175	13,870,912,099	94.67
	- Belanja pegawai	14,651,434,175	13,870,912,099	94.67
3	Belanja langsung	16,228,555,798	15,376,222,281	94,75
	-Belanja pegawai	0	0	0
	-Belanja barang-jasa	14,604,565,798	14,149,315,229	96,88
	-Belanja Modal	1,623,990,000	1,471,399,052	90,60
	Jumlah	30,879,989,973	29,491,626,380	95,50

B.3. Analisis Efisiensi dan efektifitas Kinerja Kegiatan

B.3.1. Efisiensi

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun anggaran 2020 ini telah dianggarkan belanja langsung program dan kegiatan dengan pola anggaran maksimal

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun anggaran 2020 ini telah dianggarkan belanja langsung program dan kegiatan dengan pola anggaran maksimal

pada pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 16,228,555,798,-. Adalah suatu pencapaian yang baik bagi Sekretariat DPRD ketika mampu mencapai atau mendekati target sasaran Sekretariat DPRD dengan efisiensi dengan Formulasi = $\frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja} - \text{realisasi keuangan}}{\text{Realisasi Capaian Kinerja}}$ atau $\Rightarrow (96,82 - 95,50 = 1,32\%)$ Jadi Efisiensi sebesar 1,32%.

B.3.2. Efektifitas

Sedangkan dalam aspek ini, dari target masing-masing sasaran, pencapaian efektifitas kegiatan yang menjadi sasaran utama dicapai, didapat dari nilai Unit Cost come, atau dengan kata lain Sekretariat DPRD dalam mampu memfasilitasi kegiatan ranperda dewan dalam menjalankan fungsi budgeting,legislasi dan pengawasan DPRD. Sebagai bahan evaluasi dan pekerjaan rumah terkait ranperda yang tidak dapat diselesaikan dan ditetapkan dan menjadi perda definitif yang menjadi tolak ukur akuntabilitas dalam pertanggungawaban biaya,tolak ukur komitmen kerja eksekutif dan legislatif pemerintahan daerah serta tolak ukur pencapaian manfaat yang akan diterima masyarakat atas suatu kebijakan yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1(Satu) sasaran , ditetapkan indicator kinerja sasaran sebesar 3(Tiga) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020 merupakan tahun ke-5 dari rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi dari semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indicator kinerja utama ditentukan oleh berbagai factor , antara lain sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 1(Satu) sasaran, terdapat 1 indikator utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2020 , 1(satu) indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan dari total indicator.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi Pemerintah,serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Malili, Februari 2021

 Sekretaris Dewan

Drs.Rapiuddin Tahir,M.Si

Pangkat: Pembina Tk I

NIP. 19660121 198602 1 002